

**PENGARUH PEMBANGUNAN KAMPUNG PERKOTAAN
TERHADAP KONDISI FISIK LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Kasus: Kampung Kanalsari – Semarang)**

Tugas Akhir

Oleh :

**Sari Widyastuti
L2D 002 433**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

Peningkatan kebutuhan lahan permukiman yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan, merupakan satu alasan bahwa lahan permukiman di Kampung Kanalsari menjadi suatu aset yang sangat berharga. Kepemilikan lahan yang sah menjadikan warga terus termotivasi untuk membangun dan memperbaiki rumahnya sesuai dengan kemampuan perekonomian keluarga. Maraknya pembangunan rumah menyebabkan pembangunan prasarana kampung belum menjadi prioritas utama bagi warga Kampung Kanalsari. Akibat yang kemudian dirasakan adalah jalan lingkungan mulai mengalami kerusakan, aliran air menuju Sungai Kali Banger mulai tidak lancar, terjadi genangan saat musim hujan dan melubernya air limbah cuci dan mandi ke pekarangan rumah. Permasalahan tersebut kemudian mendapat perhatian warga berupa pembangunan prasarana permukiman dan bentuk perhatian pemerintah berupa program bantuan dana kontingensi. Adanya dugaan bahwa pembangunan prasarana memiliki pengaruh terhadap kondisi fisik lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mengarahkan penelitian ini pada suatu pertanyaan penelitian yaitu **“bagaimana tingkat pengaruh pembangunan Kampung Kanalsari terhadap kondisi fisik lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Kanalsari?”**

Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat pengaruh pembangunan Kampung Kanalsari terhadap kondisi fisik lingkungan permukiman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Kanalsari. Penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan eksplanatori yang memfokuskan teori dan variabel, namun juga memerlukan penjelasan-penjelasan, sehingga penelitian ini tepat menggunakan pendekatan mix method dengan strategi triangulasi bersama. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (purposive) dan kuesioner (proposional random sampling, syaratnya adalah diambil 1 responden dalam 1 KK, berusia 20-75 tahun dan telah tinggal minimal 10 tahun). Ada beberapa analisis yang dilakukan yaitu analisis karakteristik pembangunan Kampung Kanalsari (deskriptif kualitatif), analisis tingkat kualitas (nilai indeks-likerts, distribusi frekuensi, deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif) dan analisis tingkat pengaruh pembangunan kampung perkotaan (nilai indeks-likert, deskriptif kualitatif dan kuantitatif)

Hasil yang diperoleh adalah pertama, adanya bantuan dana kontingensi dari Pemerintah Kota Semarang, ternyata mampu memotivasi warga Kampung Kanalsari untuk lebih memprioritaskan pembangunan prasarana permukiman. Kedua, tingkat kualitas fisik lingkungan permukiman di Kampung Kanalsari sebesar 42,3% dalam kondisi baik, tingkat kualitas sosial masyarakat sebesar 52,50% dalam kondisi baik dan tingkat kualitas ekonomi masyarakat sebesar 38,10% dalam kondisi cukup. Tingkat kualitas sosial yang tinggi membuktikan bahwa karakter masyarakat yang *gemeinscaft* masih tetap dapat dipertahankan di Kampung Kanalsari. Adanya legalitas lahan merupakan kunci tingginya kualitas fisik permukiman, karena dengan tanah dan bangunan yang dilindungi hukum warga merasa aman dan nyaman tinggal di Kampung Kanalsari tanpa takut adanya penggusuran kampung. Hasil ketiga, pembangunan dan perbaikan prasarana permukiman seperti jalan, saluran air, MCK dan sumur umum memiliki pengaruh pada kondisi fisik lingkungan permukiman sebesar 41,64 %, terhadap kondisi sosial masyarakat sebesar 45,29 % dan terhadap kondisi ekonomi masyarakat sebesar 13,06 % .Pengaruh sosial menduduki tingkat pengaruh tertinggi karena program pembangunan tersebut dilakukan secara swadaya berdasarkan inspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat sehingga pada akhirnya akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi warga. Pengaruh-pengaruh sosial inilah yang akan bertahan lama di masyarakat, selama masyarakat masih merasa ikut memiliki hasil pembangunan tersebut. Pengaruh secara langsung yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat dengan adanya pembangunan prasarana jalan, saluran air, MCK dan sumur umum adalah berkurangnya intensitas genangan di Kampung Kanalsari dan meningkatnya motivasi warga untuk membangun dan memperbaiki kondisi rumah

Rekomendasi bagi pemerintah walaupun bantuan dana kontingensi akan berakhir pada tahun anggaran APBD 2007, namun perlu dibentuk program-program pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang sejenis dengan sasaran lingkungan kumuh, dan lingkup organisasi terkecil di masyarakat. Bagi warga Kampung Kanalsari selain harus selalu menjaga dan melestarikan hasil pembangunan, tapi juga mulai membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan agar ancaman banjir tidak terjadi lagi. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memfokuskan pada konsep partisipasi masyarakat, peran stakeholder dalam pembangunan dan efektivitas program dalam pembangunan kampung

Key Words:

Pembangunan Kampung Perkotaan, Fisik Lingkungan Permukiman, Sosial & Ekonomi Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penduduk kota dapat ditandai dengan semakin tinggi dan menyebarnya jumlah penduduk di kota tersebut. Secara demografis, tiga sumber pertumbuhan penduduk perkotaan adalah penambahan penduduk alamiah yaitu jumlah kelahiran bayi dikurangi dengan jumlah orang meninggal; migrasi yaitu perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan (*rural*) ke wilayah perkotaan (*urban*); serta reklasifikasi yaitu perubahan status suatu "desa" (lokalitas) dari "lokalitas rural" menjadi "lokalitas urban". Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS), migrasi dan reklasifikasi memberikan andil sebesar duapertiga dalam kenaikan jumlah penduduk perkotaan, hal ini mengindikasikan bahwa migrasi dan reklasifikasi merupakan faktor utama dalam pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia (Firman dalam Soegijoko (eds), 2005: 86).

Tingginya arus urbanisasi juga menjadikan kota yang sudah padat menjadi semakin padat dengan berbagai permasalahan baik dari segi fisik, sosial, ekonomi, politik maupun kriminalitas (Ridlo, 2001: 49). Adanya berbagai permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena pihak kota sering tidak tanggap dan tidak memiliki kemampuan dalam menyiapkan prasarana dan fasilitas yang memadai untuk memfasilitasi para pendatang (Kuswartojo, 2005: 99). Selama faktor pendorong dan penarik urbanisasi masih ada dan selama tingkat kehidupan kota masih sangat mencolok dibandingkan desa, maka gejala perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan atau dari daerah *minus* ke daerah *surplus* akan terus terjadi dan mengakibatkan ketidakseimbangan persebaran penduduk dan pembangunan kota (Ahmad, 2002: 60).

Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan semakin tingginya jumlah permintaan lahan permukiman, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya nilai suatu lahan permukiman. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti kurang meratanya pembangunan dan aktivitas di atas lahan tersebut, spekulasi lahan, kepemilikan lahan berlebihan oleh pihak tertentu, aspek hukum kepemilikan dan ketidakjelasan kebijakan pemerintah dalam masalah lahan (Abrahams, dalam Panudju, 1999: 14). Ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan lahan ini menyebabkan terjadinya fragmentasi dan reduksi lahan atau penurunan luasan bidang tanah yang digunakan oleh masing-masing rumah tangga keluarga untuk mencapai keseimbangan kecukupan lahan di perkotaan. Hal ini menggambarkan adanya hubungan terbalik antara pertumbuhan spasial kota dan peningkatan jumlah penduduk, sehingga yang terjadi adalah proses pemadatan / dentifikasi (Temenggung dalam Soegijoko (eds), 2005: 242).

Fenomena kelangkaan lahan, tingginya harga lahan dan kepadatan permukiman melatar belakangi munculnya konsep *self help housing*. Konsep ini pertama dikemukakan oleh Burgess dan dapat diterapkan pada permukiman formal ataupun informal karena pada dasarnya konsep *self help housing* bukan sekedar membangun rumahnya sendiri tanpa bantuan pihak pemerintah atau swasta (*self-build*), namun diartikan lebih pada bagaimana masyarakat mampu melakukan upaya 'perubahan' sendiri pada *ready made unit* sekalipun (Burgess dalam Ikaputra, 2002:25). Konsep *self help housing* pada permukiman informal ternyata mampu mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat pendatang. Permukiman yang tumbuh dan berkembang tanpa mengikuti standar normatif yang berlaku ini, tumbuh dua kali lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan kota (Budiharjo, 1993:38). Permukiman informal perkotaan yang termasuk dalam marginalitas perkotaan adalah permukiman kampung dan permukiman kumuh termasuk *slum* dan *squater*.

Kampung sebagai satu bentuk permukiman 'organik' dan 'informal' menjadi khas karena keragaman wujud fisiknya. Proses pertumbuhan yang 'organik' menjadikan kampung mempunyai karakteristik yang berbeda (Setiawan, 2004: 4). Keadan fisik yang berbeda dengan perkampungan pedesaan inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat mengasumsikan bahwa kampung kota adalah kampung kumuh dan liar dengan segala kekotoran dan keburukan yang dimilikinya. Namun, keberadaan kampung kota tidak selamanya harus dilihat sebagai masalah permukiman perkotaan, bahkan harus diakui bahwa kampung merupakan solusi yang optimum dalam mengatasi persoalan perumahan di Indonesia. Di kampunglah berbagai kebutuhan perumahan di Indonesia diwadahi, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah yang tidak mampu menjangkau harga rumah yang disediakan oleh pemerintah dan sektor formal lainnya (Setiawan, 2004: 4). Keberagaman corak sosial dan ekonomi kampung merupakan fenomena yang menarik karena secara sosial, kampung selalu dicirikan sebagai komunitas dengan tingkat 'kebersamaan' yang istimewa seperti gotong royong yang hidup secara dinamik di kampung. Di kampung pula di temui berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang beragam sebagai perwujudan komunitas kampung untuk bertahan. Kampung, dengan demikian, bukan hanya tempat 'hunian' semata, melainkan juga tempat kehidupan yang sesungguhnya (Setiawan dalam Setiawan 2004: 5).

Salah satu kampung perkotaan yang ada di Kota Semarang adalah Kampung Kanalsari, permukiman kampung yang terletak bagian timur Kota Semarang ini berkembang seiring dengan pembangunan dan tingginya arus urbanisasi di Kota Semarang. Secara administrasi Kampung Kanalsari termasuk dalam wilayah Kelurahan Rejosari-Kecamatan Semarang Timur. Kampung Kanalsari tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu Kampung Kanalsari Barat (RW VIII) dan Kampung Kanalsari Timur (RW XIV) dan keduanya dipisahkan oleh Jalan Kalansari Raya. Jumlah penduduk Kampung Kanalsari mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Kelurahan Rejosari, pada tahun 2000 jumlah penduduk mencapai 3318 jiwa sehingga kepadatan

penduduknya 347,1 jiwa/Ha, pada akhir tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2006 jumlah penduduk tercatat sebesar 2220 jiwa sehingga kepadatan penduduk menjadi 232,2 jiwa / ha dan terdiri dari 555 Kepala Keluarga (KK).

Penurunan jumlah dan kepadatan penduduk di Kampung Kanalsari tidak menyurutkan keinginan warga untuk terus membangun dan memperbaiki rumah secara swadaya, ini dilakukan karena adanya konsekuensi bertambahnya kebutuhan ruang. Konsep *self help housing* yang dilakukan secara individual tersebut tidak selamanya baik untuk dilakukan, karena tidak diintegrasikan dengan kondisi pembangunan lingkungan sekitar seperti pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman. Pembangunan yang bertujuan menjadikan kondisi agar lebih baik akan tercapai apabila setiap proses pelaksanaan pembangunan selalu berdasar pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan inilah yang merupakan syarat terwujudnya permukiman berkelanjutan yaitu usaha peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan kualitas permukimannya (Agenda 21, 1992: 1).

Adanya fenomena kebutuhan ruang dan pembangunan permukiman di Kampung Kanalsari serta keterbatasan warga untuk mendanai biaya pembangunan mengakibatkan pembangunan prasarana kampung seperti jalan, saluran air, MCK dan sumur umum belum menjadi prioritas utama masyarakat Kampung Kanalsari. Ketimpangan pembangunan ini apabila dibiarkan berkembang tidak teratur akan menimbulkan kekumuhan kampung dan menjadikan perkembangan Kampung Kanalsari semakin organik dan sulit dikendalikan. Ancaman kekumuhan ini kemudian disadari dan direspon oleh masyarakat Kampung Kanalsari pada awal tahun 2000. Melalui organisasi-organisasi kecil dalam RT, warga mulai menggalang dana untuk memfokuskan pada pembangunan dan perbaikan prasarana jalan, saluran air, sumur dan MCK umum. Keterbatasan dana pembangunan menjadikan warga berinisiatif untuk mengajukan bantuan dana kepada pemerintah Kota Semarang melalui "Program Bantuan Dana Kontingensi". Program Bantuan Dana Kontingensi adalah program bantuan dana yang dicanangkan Pemerintah Kota Semarang untuk membantu warga dalam mendanai sebagian biaya pembangunan prasarana permukiman

Pembangunan prasarana permukiman kampung perkotaan idealnya akan memberikan pengaruh dan perubahan besar pada setiap aspek kehidupan. Pemilihan beberapa aspek kehidupan dapat dilakukan dengan menggunakan konsep pembangunan permukiman berkelanjutan, yaitu upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang, atau dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman (Agenda 21 Rio, 1992: 1). Berdasarkan pengertian diatas, maka jelas bahwa aspek fisik lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi masyarakat dapat dijadikan sebagai variabel utama dalam menilai tingkat pengaruh pembangunan yang terjadi di Kampung Kanalsari.

Adanya pembangunan kampung dan variabel terpengaruh oleh pembangunan tersebut, menjadi dasar penelitian ini sehingga penting untuk dilakukan. Hasil akhir yang diharapkan dalam penelitian ini adalah terukurnya pengaruh pembangunan Kampung Kanalsari terhadap kondisi fisik lingkungan permukiman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Kanalsari.

1.2 Perumusan Masalah

Peningkatan kebutuhan lahan permukiman yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan, merupakan satu alasan bahwa lahan permukiman di Kampung Kanalsari menjadi suatu aset yang sangat berharga. Kepemilikan lahan yang sah menjadikan warga terus termotivasi untuk membangun dan memperbaiki rumahnya sesuai dengan kemampuan perekonomian keluarga. Maraknya pembangunan rumah baik berupa peninggian lantai (*vertikal*) ataupun pemadatan bangunan (*interestrial*) menyebabkan pembangunan prasarana kampung belum menjadi prioritas utama bagi warga Kampung Kanalsari, sehingga akibat yang kemudian dirasakan oleh masyarakat adalah jalan lingkungan mulai mengalami kerusakan, aliran air menuju Sungai Kali Banger mulai tidak lancar tersumbat sampah, terjadi genangan banjir dan rob saat musim hujan, melubernya air limbah cuci dan mandi ke pekarangan rumah warga. Permasalahan tersebut kemudian mendapat perhatian dari warga berupa pembangunan prasarana permukiman dan didukung dengan kebijakan pemerintah berupa program bantuan dana kontingensi untuk membantu meringankan biaya anggaran pembangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan konsep pembangunan permukiman berkelanjutan, maka terdapat dugaan bahwa antara pembangunan kampung perkotaan memiliki pengaruh terhadap kondisi fisik lingkungan permukiman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masalah utama yang kemudian muncul adalah *belum terukurnya tingkat pengaruh pembangunan Kampung Kanalsari terhadap kondisi fisik lingkungan permukiman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Kanalsari*. Dengan mengetahui tingkat pengaruh pembangunan kampung maka dapat digunakan untuk menguji validitas dugaan penelitian. Dugaan dan masalah utama tersebut dapat mengarahkan penelitian ini pada suatu pertanyaan penelitian yaitu “*bagaimana tingkat pengaruh pembangunan Kampung Kanalsari terhadap kondisi fisik lingkungan permukiman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Kanalsari?*”

1.3 Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah terukurnya tingkat pengaruh pembangunan Kampung Kanalsari terhadap kondisi fisik lingkungan permukiman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Kanalsari.